Vox Populi
Volume 9, Nomor 1, Juni 2026 (73-82)
https://doi.org/10.24252/vp.v9i1.68379

Internalisasi Kearifan Lokal *Pappasang* dalam Kinerja Elit Politik: Studi di Kabupaten Gowa

Nila Sastrawaty *, Hamsir
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
**Corresponding Author:* nila.sastrawati@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan menganalisis proses internalisasi nilai-nilai *pappasang* sebagai kearifan lokal masyarakat Bugis-Makassar dalam kinerja elit politik, khususnya legislator DPRD Kabupaten Gowa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan anggota DPRD Kabupaten Gowa, observasi, serta studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif interpretatif menggunakan kerangka teori konstruktivisme sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai *pappasang* dimaknai sebagai pesan moral leluhur yang terinternalisasi melalui proses dialektis sejak lingkungan keluarga dan sosial awal, bukan melalui aktivitas politik formal. Nilai-nilai utama *pappasang* yakni: kejujuran, kepemimpinan, kehormatan (*siri' na pacce*), dan persatuan terimplementasi secara variatif dalam fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD. Meskipun memiliki peluang besar sebagai standar nilai politik lokal, internalisasi *pappasang* menghadapi tantangan modernisasi, pragmatisme politik, serta sifat nilai *pappasang* yang abstrak dan terbuka terhadap berbagai interpretasi. Penelitian ini menegaskan pentingnya revitalisasi kearifan lokal sebagai basis etika politik kontekstual di tingkat lokal.
Kata Kunci: *Pappasang*; Kearifan Lokal, Elit Politik

Pendahuluan

Kearifan lokal merupakan bagian penting dalam membentuk sistem nilai dan perilaku sosial masyarakat, termasuk dalam praktik politik. Pengembangan kebudayaan merupakan langkah strategis dalam pembangunan politik negara; kebudayaan mencakup pola perilaku sosial dalam suatu masyarakat, dan politik merupakan bagian dari dinamika budaya. Nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal berkontribusi besar dalam mengontrol perilaku individu (Sucipto, 2022).

Salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat Sulawesi Selatan adalah *pappasang*, yaitu wasiat atau amanah yang hampir sama dengan nasihat. Namun keduanya mempunyai nuansa masing-masing yang berbeda (Ridwan et al., 2022). *Pappasang* merupakan corak budaya yang menjadi warisan turun-temurun oleh masyarakat Makassar. *Pappasang* yang mulanya hanya berbentuk sebuah ujaran atau lisan, lambat laun dapat dibukukan dalam naskah-naskah lontarak ataupun latin. *Pappasang turiolo* Makassar mencerminkan

Article history: Received 23/5/2026; Revised 25/6/2026; Accepted 26/6/2026; Published 27/6/2026

© The Author(s), 2026.

nilai-nilai sosial budaya oleh masyarakatnya. Dalam *Pappasang* inilah kita dapat menemukan nilai-nilai sosial budaya Makassar yang melekat pada setiap masyarakat Makassar (Hasriani et al., 2020). *Pappaseng/pappasang* masih dipegang teguh sebagai pedoman hidup bagi masyarakat yang mempercayainya karena di dalamnya mengandung nilai budaya dan pesan etika (Sewang & Asdy, 2010).Dalam konteks budaya Bugis-Makassar, *pappasang* tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hidup, tetapi juga sebagai landasan moral dalam membentuk karakter individu dan sosial.

Nilai-nilai yang terkandung dalam *pappasang* seperti kejujuran, kepemimpinan, *siri'* (kehormatan), dan persatuan memiliki relevansi yang kuat dalam praktik politik modern. Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa praktik politik di Indonesia masih diwarnai berbagai pelanggaran etika, seperti korupsi, konflik kepentingan, dan rendahnya akuntabilitas publik. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai ideal dan praktik politik yang terjadi. Tren pelanggaran etika yang dilakukan oleh para penyelenggara negara di Indonesia cenderung mengalami kenaikan. *T*idak sedikit pejabat publik yang terjerat kasus korupsi. Menurunnya nilai dan etika publik di dalam tubuh para penyelenggara negara dapat dilihat dari meningkatnya praktik konflik kepentingan, tertutupnya pemerintah atas akses informasi publik serta sikap pembiaran atas praktik kekerasan fisik dan ancaman digital yang banyak dilakukan oleh penyelenggara negara(Oktari, 2023). Menelisik kasus hukum yang banyak menjerat kalangan legislatif adalah kasus korupsi. Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tercatat 2004 – 2020: Anggota DPR dan DPRD 274 orang, tertinggi ke-2 setelah korupsi di kalangan swasta (308 orang) (Sidik, 2020). Data tersebut menunjukkan bahwa regulasi yang mengatur fungsi, tugas, dan etika politik secara normatif belum secara maksimal menjadi pengontrol perilaku elit politik, sehingga dibutuhkan kaidah lain yang mengikat, yakni kearifan lokal *papasang*.

Sejumlah penelitian telah mengkaji *pappasang* sebagai nilai budaya dan pendidikan moral, namun kajian yang menghubungkan *pappasang* dengan kinerja elit politik masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji bagaimana nilai-nilai *pappasang* diinternalisasi dalam kinerja elit politik di Kabupaten Gowa. Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini berfokus pada: bagaimana internalisasi nilai-nilai *papasang* pada elit politik di Kabupaten Gowa, dan bagaimana implementasi nilai-nilai tersebut dalam kinerja politik?

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi untuk memahami makna nilai-nilai *pappasang* dalam perspektif elit politik. Penelitian dilakukan di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Data diperoleh melalui **w**awancara mendalam dengan anggota DPRD Kabupaten Gowa dan Masyarakat. Observasi terhadap praktik kinerja politik. Dokumentasi berupa dokumen resmi dan literatur terkait. Teknik pemilihan informan menggunakan *purposive sampling* dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung dalam aktivitas politik. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik.

Pembahasan

Pappasang sebagai konstruksi sosial nilai moral dalam kehidupan politik

Pappasang menempati posisi penting sebagai sistem nilai yang hidup dalam praktik sosial masyarakat Bugis-Makassar. Keberadaannya tidak hanya dipahami sebagai warisan pesan leluhur, melainkan sebagai pedoman normatif yang mengarahkan perilaku individu dalam keluarga, masyarakat, dan ruang politik. Pemaknaan terhadap *pappasang* sebagai filosofi hidup, sebagai nilai-nilai kebaikan yang perlu ditanamkan dalam diri, dan sebagai tuntunan hidup memperlihatkan bahwa *pappasang* telah bergerak dari ranah tradisi lisan menuju kesadaran etis yang bersifat personal sekaligus sosial (ALN, ADS, NDS, wawancara, 2024).

Dalam perspektif konstruktivisme sosial, realitas sosial dipahami sebagai hasil proses dialektis antara individu dan masyarakat melalui tahapan eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasiBungin Burhan, Konstruksi Sosial Media Massa (Jakarta : Prenadamedia Group, 2008), h.14. Teori ini membantu menjelaskan bagaimana nilai-nilai *pappasang* mula-mula diperkenalkan dalam keluarga sebagai pesan orang tua terdahulu, lalu memperoleh legitimasi karena diterima secara luas sebagai ukuran baik dan buruk dalam masyarakat, dan pada akhirnya diserap menjadi bagian dari kesadaran individu yang memengaruhi orientasi tindakan. Dengan demikian, *pappasang* bukan hanya peninggalan budaya, tetapi suatu sistem makna yang terus dikonstruksi, dihidupi, dan dipertahankan secara sosial. Dalam konteks politik lokal, kedudukan ini menempatkan *pappasang* sebagai sumber moral yang layak dijadikan acuan dalam pembentukan etika politik.

Internalisasi Pappasang: dari Ruang Keluarga ke Etika Politik

Internalisasi nilai *pappasang* berlangsung melalui proses sosialisasi yang berlapis. Keluarga menjadi ruang awal pewarisan makna, yang kemudian diperkuat oleh lingkungan sosial, pendidikan, pergaulan, dan media. Karena itu, *pappasang* tidak hadir sebagai ajaran yang terpisah dari kehidupan sehari-hari, tetapi tumbuh melalui pembiasaan, peneladanan, dan penguatan sosial yang berlangsung terus-menerus (AS, wawancara, 2024).

Dalam sosiologi pengetahuan, nilai budaya menjadi efektif ketika dilembagakan dalam praktik keseharian. Nilai tidak semata-mata hadir sebagai konsep abstrak, melainkan sebagai bagian dari pengalaman individu yang memengaruhi cara menilai dan bertindak (Ristianah, 2020). Dengan cara demikian, *pappasang* tidak lagi sekadar tampil sebagai norma eksternal, tetapi menjadi orientasi internal yang membentuk cara pandang terhadap tindakan yang dianggap patut atau menyimpang. Oleh sebab itu, internalisasi *pappasang* memperlihatkan bagaimana nilai budaya lokal dapat menjembatani moral personal dan tindakan kelembagaan dalam politik.

Relevansi Pappasang dengan Nilai Agama sebagai Sumber Legitimasi Moral

Kekuatan *pappasang* juga terletak pada kedekatannya dengan nilai-nilai agama, khususnya Islam. Kedekatan ini menunjukkan bahwa *pappasang* tidak hanya memperoleh legitimasi dari adat, tetapi juga dari keyakinan religius yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai seperti tolong-menolong dalam kebaikan, menjaga harmoni sosial, dan menghindari konflik memperlihatkan bahwa *pappasang* bekerja dalam horizon moral yang sejalan dengan prinsip-prinsip keagamaan (ASM, wawancara 2024).

Dalam masyarakat religius, suatu nilai budaya akan memiliki daya ikat yang lebih kuat ketika dipandang selaras dengan ajaran agama. Dalam hal ini, *pappaseng* telah dipahami sebagai sarana pendidikan moral (Handayani & Sunarso, 2020), sekaligus sebagai sumber nilai yang beririsan langsung dengan ajaran etis dan spiritual (Saputra, 2017; Susmihara, 2021). Kesesuaian ini memberi *pappasang* legitimasi ganda: sebagai warisan kultural dan sebagai sumber moral yang beresonansi dengan keyakinan masyarakat.

Dalam kehidupan politik lokal, kedudukan semacam itu memperkuat ekspektasi moral terhadap elit politik. Penilaian masyarakat terhadap elit tidak berhenti pada aspek administratif atau teknokratis, tetapi juga menyentuh integritas etis dan religius. Karena itu, *pappasang* memperoleh relevansi sebagai kerangka moral politik, sebab ia berbicara dengan bahasa budaya yang akrab sekaligus mempunyai resonansi keagamaan yang kuat (Hasanah, et al., 2022).

Nilai Kejujuran sebagai Basis Integritas Politik

Kejujuran merupakan salah satu inti nilai dalam *pappasang* yang paling dekat dengan pembentukan integritas politik. Nilai ini tidak hanya dipahami sebagai keharusan berkata benar, tetapi juga mencakup amanah, tanggung jawab, konsistensi antara janji dan tindakan, serta penghormatan terhadap hak orang lain. Dalam konteks representasi politik, kejujuran menjadi dasar moral yang menentukan kualitas hubungan antara wakil rakyat dan Masyarakat (ARL, wawancara, 2024).

Makna tersebut menjadi penting karena legitimasi politik dalam masyarakat demokratis sangat bergantung pada kepercayaan publik. Janji politik yang tidak diwujudkan dan program yang tidak direalisasikan tidak sekadar dipandang sebagai kelemahan teknis, tetapi sebagai bentuk pelanggaran terhadap amanah dan integritas (RH & IK, wawancara 2024). Dengan demikian, kejujuran dalam politik tidak berhenti pada tataran retorik, melainkan diuji melalui kemampuan mewujudkan komitmen dalam tindakan nyata.

Secara teoretik, nilai moral individu berperan dalam mengatur dan membenarkan keputusan politik (Fahmi et al., 2019). Dalam kaitan ini, kejujuran menjadi fondasi integritas politik karena menjadi dasar lahirnya kepercayaan publik. Ketidakjujuran merupakan salah satu penyebab ketidakseimbangan sosial, sedangkan dalam simbolisme budaya Makassar, hanya "kayu yang lurus" yang layak dijadikan penyangga rumah, yang secara simbolik merujuk pada hanya orang jujur yang layak menjadi pemimpin. Oleh sebab itu, kejujuran dalam *pappasang* dapat dipahami sebagai prasyarat moral bagi legitimasi dan stabilitas politik lokal (Harahap & Nadya, 2023).

Nilai Kepemimpinan: Integrasi Moral, Kecakapan, dan Orientasi Pelayanan

Kepemimpinan dalam perspektif *pappasang* tidak semata berkaitan dengan otoritas formal, tetapi dengan kualitas moral, kecakapan substantif, dan orientasi pelayanan. Kepemimpinan ideal menuntut kemampuan mengambil keputusan berdasarkan kepentingan bersama, memahami kebutuhan masyarakat, serta memiliki keteguhan moral dalam menjalankan Amanah (MYH, wawancara 2024). Pandangan ini sejalan dengan ajaran *pappasang* yang mensyaratkan pemimpin memahami adat, hukum, ketatanegaraan, bersikap sabar, serta bertakwa. Dengan demikian, kepemimpinan dalam *pappasang* berakar pada kombinasi antara kapasitas etik dan kapasitas substantif. Dalam kajian elit politik, elit memang dipahami sebagai kelompok yang memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan public (Harahap & Nadya, 2023) Namun, dalam kerangka *pappasang*, pengaruh tersebut tidak cukup diukur dari posisi dan sumber daya, melainkan juga dari moralitas, tanggung jawab, dan keberpihakan pada kepentingan publik.

Dengan cara ini, *pappasang* menawarkan kritik terhadap model elitisme yang semata-mata menekankan posisi dan kuasa. Kepemimpinan dipahami sebagai amanah sosial, bukan sekadar instrumen dominasi. Seorang pemimpin dituntut untuk melindungi, menolong, dan menjaga kesejahteraan rakyat. Karena itu, *pappasang* menyediakan kerangka etik yang memperkuat kualitas representasi politik di tingkat lokal.

Siri' na Pacce sebagai Kontrol Moral dan Dasar Empati Politik

Nilai *siri' na pacce* merupakan salah satu fondasi moral terpenting dalam budaya Bugis-Makassar. *Siri'* berkaitan dengan kehormatan, harga diri, dan rasa malu, sedangkan pacce mengandung makna empati mendalam terhadap penderitaan orang lain. Perpaduan keduanya membentuk etika yang menjaga integritas personal sekaligus memperkuat kepekaan sosial.

Dalam politik, *siri'* berfungsi sebagai mekanisme kontrol moral dari dalam diri. Nilai ini menahan seseorang dari tindakan yang mencederai martabat, termasuk ucapan yang tidak selaras dengan perbuatan. Sementara itu, *pacce* memperluas orientasi moral tersebut ke ranah sosial, sehingga kepemimpinan tidak hanya dipahami sebagai kewibawaan personal, tetapi juga sebagai keberpihakan terhadap penderitaan dan kebutuhan masyarakat.

Pemaknaan ini sejalan dengan kajian mutakhir yang menempatkan *siri' na pacce* sebagai falsafah hidup yang melahirkan ketegasan, tanggung jawab, dan solidaritas (Darussalam, 2021). Dalam konteks politik, nilai ini memperlihatkan bahwa integritas personal dan empati sosial tidak dapat dipisahkan. Elit yang menjaga *siri'* tidak mudah melanggar amanah karena tindakan semacam itu mencederai martabat dirinya, sedangkan *pacce* menuntut kepekaan terhadap aspirasi dan penderitaan rakyat. Karena itu, *siri' na pacce* dapat dipahami sebagai basis etik yang mempertemukan kehormatan pribadi dan tanggung jawab sosial dalam kepemimpinan politik.

Nilai Persatuan dalam Praktik Politik Kolektif dan Pelayanan Publik

Nilai persatuan dalam *pappasang* menekankan semangat kebersamaan, musyawarah, dan orientasi pada kepentingan bersama. Dalam praktik politik, nilai ini menjadi penting karena pengambilan keputusan yang kolektif, terbuka, dan partisipatif memperlihatkan bahwa kebersamaan bukan sekadar nilai simbolik, tetapi memiliki fungsi operasional dalam lembaga politik (HH, wawancaran 2024).

Prinsip *assamaturuk* atau kebersamaan diperkuat oleh nilai *sipakatau*, *sipakalebbi*, dan *sipakainge*, yang masing-masing menekankan penghormatan terhadap sesama, penghargaan atas perbedaan, dan sikap saling mengingatkan (HML, wawancara 2024).

Kerangka nilai ini memungkinkan perbedaan pandangan politik tetap dikelola dalam batas-batas penghormatan, sehingga konsensus dapat dibangun tanpa meniadakan keberagaman posisi.

Dalam kajian demokrasi lokal, mekanisme semacam itu dekat dengan praktik demokrasi deliberatif, yang menempatkan dialog, pertimbangan rasional, dan orientasi pada kepentingan publik sebagai dasar pengambilan keputusan (Hasanah et al., 2022). Oleh karena itu, nilai persatuan dalam *pappasang* tidak mengarah pada penyeragaman pendapat, melainkan pada kesiapan membangun keputusan bersama. Nilai ini tidak hanya relevan dalam hubungan sosial masyarakat, tetapi juga operasional dalam pengambilan keputusan politik dan pelayanan publik.

Implementasi Nilai Pappasang dalam Fungsi Dprd

Nilai-nilai *pappasang* dapat dibaca dalam tiga fungsi utama DPRD, yakni pengambilan keputusan, pelayanan publik, dan pengawasan. Dalam fungsi pengambilan keputusan, *pappasang* tercermin pada pentingnya musyawarah, keterbukaan forum, dan orientasi pada kemaslahatan masyarakat. Keputusan yang baik tidak hanya lahir dari pemenuhan prosedur formal, tetapi juga dari pertimbangan yang matang, kebijaksanaan, dan kesadaran akan dampaknya bagi publik (ST, wawancara 2024).

Dalam fungsi pelayanan publik, *pappasang* tampak melalui dorongan untuk membangun kolaborasi, transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan terhadap aspirasi masyarakat. Dengan demikian, pelayanan publik yang baik tidak hanya ditentukan oleh mekanisme birokratis, tetapi juga oleh kualitas etis relasi antara wakil rakyat dan Masyarakat (YH, wawancara 2024).

Adapun dalam fungsi pengawasan, *pappasang* menghadirkan makna ganda, yakni pengawasan terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain. Pengawasan tidak semata-mata dipahami sebagai instrumen administratif, melainkan sebagai ekspresi tanggung jawab etik dalam tata kelola pemerintahan daerah. Sikap menjaga diri dari penyimpangan, bertanggung jawab atas tindakan, dan saling mengingatkan ketika terjadi pelanggaran memperlihatkan bahwa fungsi pengawasan memperoleh dimensi moral yang kuat ketika dibaca melalui *pappasang* (ST, wawancara 2024).

Secara kelembagaan, fungsi-fungsi tersebut selaras dengan peran DPRD dalam legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana diatur dalam pedoman tata tertib DPRD. Namun demikian, pelaksanaan fungsi tersebut menjadi lebih bermakna ketika ditopang oleh internalisasi nilai budaya lokal. Artinya, aturan formal memperoleh kedalaman etik ketika dijalankan oleh aktor yang memiliki orientasi moral yang kuat.

Peluang dan Tantangan Internalisasi Pappasang dalam Politik Lokal

Peluang utama internalisasi *pappasang* terletak pada kesesuaiannya dengan nilai agama, dukungan masyarakat, dan pengakuan bahwa nilai-nilai tersebut masih relevan dalam menjaga etika politik. Faktor-faktor ini membuat *pappasang* tetap memiliki daya hidup sebagai sumber moral yang dapat menjadi penyeimbang terhadap dampak negatif perkembangan zaman.

Namun, internalisasi tersebut juga berhadapan dengan tantangan yang tidak ringan. Modernisasi dan globalisasi membawa nilai individualisme, materialisme, dan pragmatisme yang berpotensi menggeser orientasi kolektif dan spiritual dalam *pappasang*. Selain itu, sifat nilai-nilai *pappasang* yang abstrak dan universal membuka ruang tafsir yang beragam ketika diterjemahkan ke dalam kebijakan politik yang konkret. Dalam arena politik yang sarat kepentingan, nilai seperti kejujuran, keadilan, dan kebersamaan sering berhadapan dengan logika pragmatis dan kalkulasi kekuasaan(Oktari, 2023) Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara rasionalitas moral budaya dan rasionalitas instrumental politik modern. *Pappasang* bekerja dalam logika kehormatan, amanah, dan solidaritas, sedangkan politik kontemporer cenderung bergerak dalam logika efisiensi, persaingan, dan negosiasi kepentingan. Dengan demikian, tantangan terbesar bukan hanya menjaga eksistensi simbolik *pappasang*, tetapi mentransformasikannya menjadi etika operasional yang benar-benar memengaruhi perilaku politik.

Secara keseluruhan, *pappasang* dapat diposisikan sebagai etika politik lokal yang dibentuk melalui proses konstruksi sosial dan diinternalisasi ke dalam orientasi perilaku elit politik. Nilai kejujuran, kepemimpinan, *siri' na pacce*, dan persatuan tidak hanya menjadi identitas budaya masyarakat Gowa, tetapi juga berfungsi sebagai standar normatif dalam menilai dan mengarahkan kinerja politik. Dengan demikian, perilaku elit tidak cukup dipahami hanya dari perspektif kekuasaan dan institusi, tetapi juga perlu dibaca melalui kerangka budaya dan moral lokal yang hidup dalam Masyarakat.

Kesimpulan

Pappasang dalam konteks budaya Makassar, merujuk pada filosofi hidup yang menekankan pada nilai moral dan etika dan diimplementasikan dalam proses interkasi sosial dan politik, sebagai pedoman yang berimplikasi pada kinerja politik. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman aktor politik terhadap *pappasang* dapat memengaruhi legitimasi dan dukungan masyarakat terhadap kebijakan yang diambil. Pemahaman yang mendalam tentang *pappasang* sangat penting bagi actor politik untuk menginternalisasi *pappasang* dalam kinerja politik yang dapat diterima masyarakat. Kebijakan yang sejalan

dengan *pappasang* cenderung lebih diterima oleh masyarakat dan memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi.

Kebijakan yang sejalan dengan *pappasang* tidak hanya akan mendapatkan dukungan dari masyarakat, tetapi juga memiliki peluang lebih besar untuk berhasil dalam implementasinya. Oleh karena itu, aktor politik perlu melibatkan masyarakat dan mempertimbangkan nilai-nilai *pappasang* dalam setiap langkah pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, baik masyarakat maupun actor politik harus memiliki persepsi yang sama bentuk konkrit dari nilai kejujuran (*lempu*), nilai kehormatan (*siri' na pace*), nilai kepemimpinan, dan nilai persatuan, dalam menjalankan fungsi legislasi/pengambilan keputusan, pelayanan publik, dan pengawasan dan evaluasi program kerja.

Meskipun *pappasang* memiliki peran penting dalam politik, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh aktor politik dalam memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai ini, yakni; perubahan zaman yang cenderung menggeser eksistensi nilai-nilai *pappasang*, perbedaan interpretasi terhadap *pappasang* di antara berbagai kelompok masyarakat dipengaruhi perbedaan latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi dapat memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap *pappasang*, sehingga menciptakan kesulitan bagi aktor politik dalam merumuskan kebijakan yang dapat diterima oleh semua pihak, dan nilai-nilai *pappasang* yang bersifat abstrak dan universal sehingga menimbulkan interpretasi yang berbeda dikalangan actor politik dalam konteks politik.

Pernyataan Keaslian

Kami menyatakan artikel ini adalah karya asli yang belum pernah dipublikasikan dan semua sumber referensi telah dicantumkan. Kamu juga menyatakan bahwa artikel ini tidak sedang dikirimkan ke jurnal lainnya.

Referensi

Burhan, B. (2008). *Konstruksi Sosial Media Massa*. Jakarta : Prenadamedia Group, 2008.

Darussalam, F. I. (2021). Siri' na pacce dan identitas kebudayaan. *Jurnal Kebudayaan*, *14*(1), 1–5.

Fahmi, I., Takwin, B., & Muhamad, R. (2019). Nilai moral sebagai prediktor orientasi politik pada anggota organisasi keagamaan. *Psympathic: Jurnal Ilmiah Psikologi*, *6*(2).

Handayani, D., & Sunarso, S. (2020). Eksistensi budaya pappaseng sebagai sarana pendidikan moral. *Mudra: Jurnal Seni Budaya*, 235–245.

Harahap, M., & Nadya, R. (2023). Elit politik di Indonesia: Akar dan dampak

penyalahgunaan hak berdemokrasi. *Comserva*, *3*(6), 2149–2160.
Hasanah, U., Kirani, C., Gabylia, E. M., & Adawiyah, R. (2022). Etika dan budaya politik: Konsep sistem politik di Indonesia. *Jurnal Pendidikan, Sains Dan Teknologi*, *1*(2), 330–343. http://jurnal.minartis.com/index.php/jpst/article/view/418
Hasriani, H., Sartika, E., & Ratnawati, R. (2020). Nilai sosial budaya berbasis katrakter dalam pappasang turiolo Makassar: Kajian sosiologi sastra. *Ndonesia: Jurnal Pembelajaran Bahasa Dan Sastra Indonesia*, *1*(2), 115–121.
Oktari, Y. (2023). Urgensi Etika Pejabat Publik dan Peranan Generasi Z dalam Studi Administrasi Publik. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, *009*(01), 11–20. https://doi.org/10.21776/ub.jiap/2023.009.01.2
Ridwan, A. R., Rustan, A. S., & Nurkidam, A. (2022). Pappasang dalam komunikasi budaya masyarakat lokal suku Mandar. *Jurnal Komunikasi*, *7*(2), 129–138.
Ristianah, N. (2020). Internalisasi Nilai-Nilai Keislaman Perspektif Sosial Kemasyarakatan. *Darajat: Jurnal PAI*, *3*(1), 1–13.
Saputra, D. G. (2017). Pemahaman nilai-nilai pappasang dalam meningkatkan karakter bangsa yang berkearifan lokal. *Jurnal Risenologi KPM UNJ*, *2*(1), 46–55.
Sewang, A., & Asdy, A. (2010). *Etika dalam kehidupan orang Mandar*. Yayasan Maha Putra.
Sidik, F. M. (2020). Sejak 2004 hingga 2020 ada 274 anggota DPR/DPRD jadi tersangka KPK. *Detiknews*. https://news.detik.com/berita/d-5243038/sejak-2004-hingga-2020-ada-274-anggota-dpr-dprd-jadi-tersangka-kpk
Sucipto. (2022). MPR sebut pembangunan budaya penting untuk mewujudkan politik yang lebih bermartabat. *SindoNews*. https://nasional.sindonews.com/read/872281/12/mpr-sebut-pembangunan-budaya-penting-untuk-mewujudkan-politik-yang-lebih-bermartabat-1661947711
Susmihara. (2021). *Pappaseng dalam lontara Bugis: Perspektif pendidikan Islam*. Alauddin University Press.